

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes, A. A. (2020). *Analisis Peran Aktor dalam Penetapan Agenda Kebijakan Pembangunan Taman Kota di Surabaya*. Universitas Airlangga.
- Anggara, S. (2016). *Ilmu Administrasi Negara-Kajian Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. CV Pustaka Setia.
- Araujo, L. B. D. & S. & R. (2013). Dinamika Pembuatan Kebijakan Desentralisasi di Timor-Leste. *WACANA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 16(1), 52–64.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam. (2020). *Kota Batam dalam Angka 2020*.
<https://doi.org/1102001.2171>
- Dalla, A. Y. & F. N. H. (2018). Tumpang Tindih Kewenangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam. *MATRA PEMBARUAN*, 2(2), 139–148.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21787/mp.2.2.2018.139-148>
- Esa, R. . (2015). Pertarungan Kepentingan Politik dalam Perumusan RPJM arah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015. *Jurnal Politik Profetik*, 6(2), 256–267.
- Fauzi, A. N. & D. R. (2018). Analisis Peran Aktor dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(4). <https://doi.org/10.14710/jppmr.v7i4.22052>
- Fauzi, A. N., & Dewi Rostyaningsih. (2018). Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(4), 1–18.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/22052/20296>

- Febriyandi, D. (2015). Proses Perumusan Kebijakan Pemekaran Daerah (Studi di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara). *Jurnal Politik Profetik*, 6(2), 68–88.
- Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintahan dari Filosofi ke Implementasi*. CV Pustaka Setia.
- Humas. (n.d.). *Jaga Momentum Investasi, Menko Perekonomian Lantik Edy Putra Irawady jadi Kepala BP Batam*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Retrieved January 20, 2021, from <https://setkab.go.id/jaga-momentum-investasi-menko-perekonomian-lantik-edy-putra-irawadi-jadi-kepala-bp-batam/>
- Humas Badan Pengusahaan Batam. (2020). *Latar Belakang Badan Pengusahaan Batam*. Badan Pengusahaan Batam. <https://bpbatam.go.id/profil/latar-belakang/>
- Komisi II. (2019). *Penunjukkan Wali Kota Batam Sebagai Ex Officio Kepala BP Batam Berpotensi Maladministrasi*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. <https://dpr.go.id/berita/detail/id/24690/t/Penunjukkan+Wali+Kota+Batam+Sebagai+Ex+Officio+Kepala+BP+Batam+Berpotensi+Maladministrasi>
- Kummeth, J. (2015). *The Politics of Publics Policy Decisions in Local Government in Uganda*. Bayreuth University.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Salaputra & M. Madani & A. Prianto. (2013). Peran Aktor dalam Penyusunan

- Agenda Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 35–47.
- Sanjaya. (2018). Dinamika Aktor dalam Upaya Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2014. *JOM FISIP UNRI*, 5(2), 1–17.
- Sarwono, S. W. (2008). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. PT Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, B. & H. N. (2020). Analisis Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2). <https://doi.org/10.14710/jppmr.v9i2.27351>
- Setyowati, H. H. (n.d.). *Dewan Kawasan Batam Lantik Walikota Sebagai Kepala BP Batam*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Retrieved January 20, 2021, from <https://ekon.go.id/publikasi/detail/1111/dewan-kawasan-batam-lantik-walikota-sebagai-kepala-bp-batam>
- Subarsono, A. (2013). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syafiie, I. K. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta.
- Thoha, M. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer* (1st ed.). Kencana.
- Trisnawati, A. & B. S. (2015). Analisis Peran Aktor dalam Pemekaran Kabupaten Brebes. *Journal of Politics and Government Studies*, 4(2), 1–21.

- Yakub, Y. K. (2015). *Provinsi Kepulauan Riau: Pengetahuan Muatan Lokal untuk Pendidikan Dasar dan Menengah serta Umum*. Bestko, 2000 Batam.
- Zaenuddin, M. & W. K. & S. S. & A. H. H. (2017). Dualisme Kelembagaan antara Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Batam serta Dampaknya terhadap Kinerja Perekonomian di Kota Batam. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1(2), 219–231. <https://doi.org/https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.613>
- Zaenuddin, M. & W. K. & S. S. & A. H. H. (2018). Identifikasi Permasalahan Pasca Diterapkan Otonomi Daerah di Kota Batam dan Alternatif Solusi Kebijakan Mendatang. *Prosding Seminar Nasional Cendikiawan*, 1095–1104. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/semnas.v0i0.3441>
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas